

MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK (TANTANGAN DAN SOLUSINYA)

Oleh :

DR. I KETUT ADI PURNAMA, S.H.,M.H., C.M.C.

Pendahuluan

Kepercayaan publik adalah pilar utama keberlangsungan setiap institusi negara. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri, sebagai institusi penegak hukum dan pelayan masyarakat, sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini berbagai persoalan telah menimpa institusi Polri seperti kejadian Polisi tembak Polisi, penyalahgunaan wewenang, minimnya transparansi, dan ketidak harmonisan hubungan dengan masyarakat telah menurunkan citra Polri di mata publik.

Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi Polri dalam menjalankan perannya sebagai pengayom masyarakat. Penulis dalam tulisan ini akan membahas tantangan utama yang dihadapi Polri dalam mengembalikan kepercayaan publik dan memberikan solusi strategis yang dapat diimplementasikan melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan profesionalisme.

Tantangan Polri dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik

1. Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum Polri, seperti kekerasan berlebihan (*excessive force*), penyalahgunaan penggunaan senjata api, penyalahgunaan Narkoba, melakukan pungutan liar, keterlibatan dalam praktik korupsi, dan masih

banyak penyalahgunaan wewenang lainnya telah menjadi sorotan masyarakat, media dan viras di banyak media sosial . Kasus-kasus ini menciptakan persepsi negatif bahwa Polri tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas.

2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Polri sering kali dianggap kurang transparan dalam menangani pelanggaran internal, terutama yang melibatkan anggotanya. Proses penegakan disiplin yang tidak dipublikasikan secara terbuka menimbulkan kecurigaan bahwa pelanggaran ditangani secara tidak adil atau ditutup-tutupi. Belum lagi tentang adanya kecurigaan keterlibatan oknum anggota Polri sebagai beking judi online dan banyaknya anggota Polri yang terlibat dalam judi online.

3. Kurangnya Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana.

Polri sering kali dianggap lebih fokus pada penindakan hukum daripada membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pencegahan dan penegakan hukum menciptakan jarak antara institusi ini dan rakyat yang dilayaninya.

4. Tantangan Kejahatan Modern

Kejahatan berbasis teknologi seperti siber crime semakin meningkat, sementara kemampuan anggota Polri untuk menanganinya belum sepenuhnya optimal. Tantangan ini menuntut modernisasi dalam metode kerja dan pelatihan Polri.

5. Beban Psikologis Anggota Polri

Tekanan tugas yang tinggi, kurangnya dukungan psikologis, serta sistem kerja yang kadang tidak manusiawi dapat memengaruhi kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Solusi untuk Dapat Meraih Kepercayaan Publik

1. Peningkatan Akuntabilitas Internal dan Eksternal

Polri perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui Inspektorat Pengawasan dan Divisi Propam untuk memastikan penegakan disiplin dan penegakan hukum kepada anggota Polri yang bersalah ataupun melanggar harus diberikan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran anggota. Selain itu, laporan berkala tentang tindakan disiplin harus dipublikasikan untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Polri juga dapat melibatkan lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ormas, LSM dan Netizen untuk mengawasi kinerja Polri dan dapat menjaga akuntabilitas.

2. Penerapan Teknologi untuk Transparansi

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi. Seperti SKCK online, SIM & STNK online, sistem pengaduan online yang mudah diakses masyarakat harus dikembangkan, sehingga setiap laporan dapat dilacak dengan jelas. Selain itu, penggunaan body camera pada anggota Polri yang bertugas dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memberikan bukti yang objektif jika terjadi sengketa. engketa.

3. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan

Polri perlu menyediakan pelatihan berkala tentang etika profesi, hak asasi manusia (HAM), dan pendekatan humanis dalam penanganan kasus. Pelatihan ini harus disertai dengan pengenalan teknologi terbaru untuk menghadapi tantangan kejahatan siber dan transnasional. Selain itu, anggota Polri perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif dan tidak arogan untuk mengurangi potensi konflik.

4. Pendekatan Humanis dan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Polri dapat mengadopsi pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus, terutama untuk kasus-kasus ringan. Pendekatan ini memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

5. Menjadi contoh dan menjadi tauladan bagi anggota Polri dan juga bagi masyarakat. Setiap anggota Polri harus bisa menjadi tauladan kepada bawahannya dan juga masyarakat.

6. Penguatan Kesejahteraan dan Kesehatan Mental Anggota Polri

Untuk meningkatkan kinerja, Polri perlu memberikan dukungan kesejahteraan dan kesehatan mental kepada anggotanya. Program konseling, pelatihan manajemen stres, serta penghargaan bagi anggota yang berprestasi dapat meningkatkan motivasi dan kualitas kerja, namun tetap ditekankan untuk tidak hidup hedon.

7. Peningkatan Interaksi dengan Masyarakat

Program-program berbasis komunitas seperti patroli berbasis komunitas (*community policing*) harus ditingkatkan. Forum dialog rutin juga perlu diadakan untuk mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, Polri dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat.

Kesimpulan

1. Mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri membutuhkan upaya serius dalam reformasi kelembagaan dan peningkatan profesionalisme.

2. Polri harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

3. Dengan memanfaatkan teknologi modern, melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan anggota, Polri dapat memperbaiki citranya dan kembali menjadi institusi yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Reformasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan citra Polri, tetapi juga untuk memastikan bahwa institusi Polri dapat terus menjalankan perannya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dengan baik.

Sekian dan Terimakasih.

Sumber : <https://www.paramadina-pusad.or.id/membangun-empati-antara-polri-dan-masyarakat/>

